

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Konsili Vatikan II menjadi salah satu babak penting dalam perjalanan Gereja di tengah dunia. Jika pada masa-masa sebelumnya, Gereja cenderung terperangkap dalam suatu paham atau paradigma eksklusif, *extra ecclesiam nulla salus* (di luar Gereja tidak ada keselamatan), maka melalui Konsili Vatikan II Gereja berkomitmen untuk lebih terbuka dan memandang secara positif realitas di luar dirinya. Karena itu, tidak mengherankan apabila Konsili Vatikan II disebut sebagai suatu momentum *aggiornamento* atau pembaruan diri Gereja sesuai dengan perkembangan zaman. Gereja kini lebih terbuka terhadap dunia dengan segala realitas dan pergumulan yang mengitarinya.

Dunia yang menjadi medan bagi aktualisasi diri Gereja itu bukanlah dunia yang homogen, melainkan suatu dunia yang menyimpan segudang realitas dan serangkaian jejaring konteks yang kompleks. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* nomor 4 menggambarkan konteks itu dengan mengangkat sejumlah pertentangan, yakni kelaparan, kekurangan, dan buta huruf di tengah kelimpahan harta kekayaan dan kemajuan ekonomi, perbudakan sosial dan psikis di tengah bangkitnya kesadaran perihal kebebasan, serta perpecahan dan perang di tengah persatuan dan saling bergantung antarbangsa secara global.¹ Karena itu, konteks yang menjadi medan aktualisasi diri dan ranah bagi refleksi keberيمان Gereja merupakan dunia yang menyimpan sekaligus di dalamnya pengalaman-pengalaman kemiskinan dan kesejahteraan, sukacita dan dukacita, kegembiraan dan kesedihan, atau kematian dan kehidupan. Pengalaman-pengalaman tersebut mesti disentuh dan disapa, atau bahkan ditentang dan digugat. Dengan demikian kehadiran Gereja di dunia bisa menjadi suatu bentuk ungkapan pembebasan bagi umat.

¹ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, cet. ke-9 (Jakarta: Penerbit Obor, 2008), hal. 525.

Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengelaborasi fenomena kemiskinan yang pada gilirannya telah lama menjadi simptom bagi keberlangsungan hidup masyarakat global umumnya dan masyarakat lokal di Gereja Keuskupan Ruteng khususnya. Dalam kajian ini penulis tidak memahami kemiskinan secara reduktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Cipry Jehan Paju Dale, dalam pemetaan reduktif kemiskinan seringkali diidentikkan dengan 1) angka-angka, 2) sisi pengeluaran makanan dan non-makanan, dan 3) karena itu sama sekali terlepas dari faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya.² Hal itu misalnya tampak dalam perhitungan statistik yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik milik pemerintah.³ Melampaui pemahaman reduktif demikian, penelitian ini melihat kemiskinan sebagai suatu realitas luas dan kompleks yang berkelindan erat dengan dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini sejurus dengan pemahaman yang berkembang dalam tradisi pemikiran para teolog pembebasan. Bagi para teolog pembebasan, kemiskinan merupakan akibat dari tindakan historis berupa kejahatan struktural yang menindas dan membelenggu. Jon Sobrino misalnya membaca realitas demikian sebagai upaya penyaliban secara sistemik melalui ketidakadilan struktural yang menggurita di dalam praksis hidup orang-orang miskin El Salvador.⁴ Selain itu, Gustavo Gutierrez mengidentifikasi realitas kemiskinan secara struktural sebagai akibat faktor dari luar diri orang miskin, seperti

² Cypri Jehan Paju Dale, *Kuasa Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik* (Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013), hal. 18.

³ Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang diukur dari sisi pengeluaran, BPS memahami kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Metode yang dipakai ialah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang mencakup Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Berdasarkan pendekatan dan metode demikian, terdapat 1,13 juta orang (20,05 persen dari penduduk NTT) yang dikategorikan sebagai penduduk miskin karena tidak dapat mencapai standar minimum pengeluaran sebesar Rp. 460.823 per kapita per bulan. Selain itu untuk konteks Manggarai Raya, BPS merilis jumlah penduduk miskin masing-masing sebagai berikut: Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 74,55 ribu (25,35 persen) dengan GK sebesar Rp. 411.670 per kapita per bulan, Kabupaten Manggarai sebanyak 69,68 ribu (19,84 persen) dengan GK sebesar Rp 407.261 per kapita per bulan, dan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 49,95 ribu (17,15 persen) dengan GK sebesar Rp 405.746 per kapita per bulan. Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan jumlah penduduk di kabupaten terkait. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2023," hal. 315 <<https://ntt.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Nusa+Tenggara+Timur+dalam+angka&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>> [diakses 13 November 2023].

⁴ Jon Sobrino, *Principle of Mercy: Taking the Crucified People from the Cross* (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1994), hal. 50.

penindasan dan pemerasan.⁵ Dalam rangka memperoleh keuntungan dari realitas memilukan ini, kemiskinan diciptakan sebagai rekayasa oleh pihak-pihak tertentu.⁶

Yang menjadi sumber dari persoalan kemiskinan ialah ketidakadilan struktural yang seringkali mewarnai keberlangsungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu komunitas politik. Masyarakat tidak diberikan akses yang memadai terhadap sumber-sumber daya yang menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Pemasangan terhadap hak masyarakat tersebut bersumber dari kehendak suatu kelompok masyarakat yang memegang kuasa baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kelompok-kelompok tersebut seringkali mencari keuntungan dari sejumlah kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Pokok soal yang dibahas oleh mereka bukannya seberapa relevan suatu kebijakan politik bagi kemaslahatan bersama melainkan seberapa besar keuntungan yang bisa mereka peroleh melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Beberapa peneliti yang mengkaji fenomena kemiskinan di Manggarai Raya memaknai kemiskinan di daerah tersebut sebagai suatu realitas kompleks yang seringkali berkelindan erat dengan imaji pembangunan dan ideologi kapitalisme-neoliberal. Tinjauan etis, filosofis, dan teologis atas korporasi tambang di Kabupaten Manggarai Barat oleh Benny Denar misalnya membaca kemiskinan, marginalisasi, penderitaan, dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari strategi pembangunan yang mementingkan ideologisasi pertumbuhan ala rezim kapitalisme-neoliberal.⁷ Dengan bertitik tolak pada Ajaran Sosial Gereja, *Piramida Korban* karya Peter L. Berger, dan kiprah penolakan Gereja Keuskupan Ruteng terhadap praktik pertambangan, Denar kemudian merekomendasikan etika pembangunan yang bertitik tolak dari fakta penderitaan.⁸ Studi serupa juga dilakukan oleh Maximus Regus dengan fokus kajian pada resistensi lokal terhadap kehadiran korporasi tambang. Menurut Regus, eksploitasi besar-besaran perusahaan tambang di Manggarai telah menyebabkan dominasi, marginalisasi,

⁵ Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez Refleksi dari Praksis Kaum Miskin* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 53.

⁶ R.F. Bhanu Viktorahadi, Mochamad Ziaul Haq, dan Yeni Huriyani, 'Cara Pandang Gereja Terhadap Kemiskinan dan Pembangunan', *Hanifyyah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4.2 (2021), hal. 155.

⁷ Benny Denar, *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?: Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis, dan Teologis atas Korporasi Tambang* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2015), hal. 305.

⁸ Denar, hal. 306.

kehancuran ekologis, degradasi sosial budaya, dan kemiskinan.⁹ Lebih lanjut, Regus menegaskan bahwa kemiskinan terjadi karena upaya menggapai kemakmuran melalui mekanisme pembagian hasil antara korporasi dan negara tidak membawa implikasi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.¹⁰ Alhasil, kenyataan-kenyataan demikian telah mendorong lahirnya gerakan resistensi dari masyarakat lokal.

Selain itu, studi intensif yang dibuat oleh Cipry Jehan Paju Dale melihat kemiskinan di Manggarai Raya sebagai suatu kenyataan yang menyatu dan saling mendukung dengan praktik kuasa hegemonik dan pembangunan. Proyek pembangunan di Manggarai Raya, demikian menurut Dale, menjadi suatu medan bagi praktik kekuasaan yang hegemonik. Alih-alih mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, praktik pembangunan yang diinisiasi oleh kekuasaan baik politik maupun ekonomi itu telah berhasil melahirkan dan melanggengkan kemiskinan di tengah masyarakat. Kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai suatu persoalan sosial, ekonomi, politik, atau kultural yang mesti diatasi, tetapi justru direkayasa sebagai basis pembenaran bagi proyek yang menguntungkan segelintir elite. Dengan demikian, lingkaran setan pembangunan, kuasa hegemonik, dan kemiskinan sistemik di Manggarai Raya telah berhasil membuat para elite politik dan ekonomi lokal menempati pucuk kekuasaan dan kekayaan, serentak pula melemparkan rakyat kebanyakan ke dalam jurang kemiskinan akut.¹¹

Merujuk pada beberapa penelitian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kemiskinan di Manggarai Raya pada dasarnya disebabkan oleh faktor struktural berupa praktik penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh elite-elite yang berkuasa baik secara politik maupun ekonomi. Kesimpulan tersebut tentu saja berbeda dengan klaim moralistik yang melihat sebab kemiskinan pada diri orang miskin itu sendiri. Dalam klaim demikian, orang-orang miskin seringkali dipersalahkan karena kemalasan dan etos kerja yang minimalis. Sementara itu, faktor struktural melihat baik elite politik maupun elite ekonomi sebagai agen yang memiliki akses mumpuni terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Hal inilah

⁹ Regus, 'Tambang dan Perlawanan Rakyat : Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT', *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 16.1 (2011), hal. 22.

¹⁰ Maximus Regus, hal. 20.

¹¹ Dale, hal. 12.

yang pada akhirnya akan melahirkan dominasi dan hegemoni dalam struktur kehidupan masyarakat lokal.

Dalam kacamata ekonomi politik, dominasi elite-elite politik maupun ekonomi merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari merebaknya paham kapitalisme neoliberal. Kapitalisme neoliberal merupakan ideologi yang bertumpu pada logika akumulasi modal dan perburuan rente, fundamentalisme pasar, deregulasi dan debirokratisasi. Sebagai konsekuensi dari totalitas pasar, intervensi pemerintah sedapat mungkin dibatasi dan kalau perlu ditiadakan. Karena itu, perekonomian sepenuhnya dikendalikan oleh para pelaku pasar (*invisible hand*) melalui motif setiap orang untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing.¹² Sebagai sebuah ideologi yang kental dengan logika perburuan rente, kapitalisme neoliberal telah berhasil memusatkan modal ke tangan kelompok-kelompok kapitalis. Akumulasi modal melalui konsentrasi dapat dilakukan melalui investasi profit secara berangsur-angsur dan berkelanjutan. Dengan dua modus akumulasi modal tersebut segelintir kapitalis dapat dengan mudah menjadi semakin kaya dan menguasai sumber daya ekonomi kolektif.¹³

Kepemilikan modal material yang mumpuni menyebabkan para kapitalis tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi politik lokal yang kental dengan demokrasi borjuis dan praktik politik transaksional. Mereka dapat membangun aliansi dan kerja sama mutual dengan para penguasa politik. Selain itu, mereka juga dapat terjun ke dunia politik dengan memanfaatkan kepemilikan modal material yang mumpuni. Dua modus intervensi politik tersebut akan mempermudah penguasaan atas sumber daya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kelompok kapitalis yang juga merangkap sebagai politisi itu dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang mendukung praktik perburuan rente. Dalam konteks struktural demikian, kebijakan-kebijakan politik akan membentangkan karpet merah bagi agenda-agenda kapitalisme neoliberal seperti investasi, komodifikasi, privatisasi, dan industrialisasi. Dengan demikian, kekuasaan politik akan memberikan dukungan dan perlindungan bagi kebijakan-kebijakan politik yang

¹² Denar, hal. 64.

¹³ Anto Sangadji, "Kontradiksi Kapitalisme dan Rasisme", dalam Dede Mulyanto dan Coen Husain Ponto (eds.), *Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia* (Jakarta: IndoPROGRESS dan Islam Bergerak, 2017), hal. 10–11.

ramah terhadap kapitalisme neoliberal bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang memasung hak politik dan kebebasan para warga lokal.

Studi yang dibuat oleh Dale terhadap geliat pembangunan pariwisata sebagai *leading sector* (sektor utama) pembangunan di Manggarai Barat menjadi contoh paling nyata dari struktur dominasi di atas. Dale menulis:

Keberadaan komodo dan pembangunan pariwisata [di Labuan Bajo] membawa keuntungan besar bagi para pemodal dan elite lokal yang dengan satu dan lain cara, legal dan ilegal, terlibat dalam bisnis pariwisata; namun manfaat bagi masyarakat umum tidak sebesar yang diklaim pemerintah dan pelaku bisnis. Malahan masyarakat lokal turut menanggung risiko dari pembangunan yang memprioritaskan pariwisata sebagai *leading sector*, dan yang berbasis investasi.¹⁴

Jelas bahwa praktik kekuasaan yang sarat dengan simbiosis mutualisme antara pebisnis-politisi, dan karena itu telah dirasuki oleh logika akumulasi modal, cenderung menguntungkan kelompok-kelompok seperti pebisnis, investor global, dan elite lokal sebagai kolega dari para aktor global tersebut. Sementara itu masyarakat miskin yang seharusnya menjadi subjek utama dalam setiap agenda politik dan ekonomi justru dimarginalkan. Akibatnya, masyarakat kebanyakan akan tetap tenggelam dalam kubangan kemiskinan, sementara elite-elite lokal baik politik maupun ekonomi menguasai sumber-sumber daya setempat.

Lantas, bagaimana sikap Gereja Keuskupan Ruteng dalam menghadapi kenyataan kemiskinan tersebut? Kemiskinan struktural yang dialami oleh kebanyakan masyarakat Manggarai Raya menjadi sebuah konteks yang mesti disapa dan digugat dalam praksis pelayanan Gereja Keuskupan Ruteng. Gereja dan para pelaku pastoral tidak bisa mengambil sikap permisif dengan mengabaikan kemiskinan kebanyakan umat yang menjadi subjek penting dalam pewartaannya. Sikap demikian akan bertolak belakang dengan hakikat tugas perutusan Gereja, yakni mewartakan Kerajaan Allah di tengah dunia kini. Kerajaan Allah tidak hanya dipahami secara eskatologis yakni melalui kebahagiaan kekal. Lebih daripada itu, Kerajaan Allah mesti bisa dibangun di dunia sini-kini melalui pengentasan terhadap berbagai bentuk penindasan, pemiskinan, dan ketidakadilan struktural yang dialami oleh umat Allah itu sendiri. Dengan demikian, Gereja Keuskupan Ruteng tidak bisa berdiam diri. Pernyataan ini dilandasi oleh beberapa alasan berikut.

¹⁴ Dale, hal. 103.

Pertama, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* nomor 1 menyatakan secara lugas bahwa “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.¹⁵ Gereja harus memandang penderitaan orang-orang miskin sebagai penderitaan Gereja yang merupakan murid Kristus. Solidaritas ini menjadi salah satu ciri khas Gereja dalam memaknai keberadaannya di tengah dunia. Dengan ikut terlibat dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dunia, Gereja menunjukkan tanggung jawabnya bagi dunia dan turut memposisikan diri sebagai korban dari struktur kekuasaan dunia yang tidak adil.¹⁶

Kedua, praktik kehidupan beragama selalu memuat dua aspek penting yakni wahyu dan iman. Wahyu merupakan pernyataan diri Allah kepada manusia, sedangkan iman merupakan tanggapan manusia atas pernyataan diri Allah tersebut. Allah menawarkan diri untuk terlibat dalam diri manusia dan kehidupan yang mengitarinya. Kehadiran Allah itu adalah sebuah kehadiran yang menyelamatkan. Allah terlibat dalam kehidupan umat manusia dengan keluar dari diri-Nya dan meninggalkan segala kemapanan-Nya. Hal ini sudah dimulai sejak awal mula melalui kisah penciptaan alam semesta dan manusia. Keterlibatan Allah dalam sejarah hidup manusia kemudian disempurnakan dalam hidup, karya, wafat, dan kebangkitan Yesus itu sendiri.

Karena Allah adalah Dia yang terlibat dan bersolider, iman sebagai tanggapan manusia terhadap Allah mestilah juga merupakan iman yang terlibat dan iman yang mampu bersolider.¹⁷ Iman menuntut tanggung jawab manusia untuk bisa mengambil bagian dalam kerja keselamatan Allah. Karena itu, iman akan Allah tidak bisa dimaknai sebagai suatu kemewahan yang eksklusif dan apatis. Dalam imannya akan Allah, orang-orang beriman mesti bisa mengikuti teladan Allah, yakni keluar dari kemapanannya sendiri, pergi berjumpa dengan sesama, dan mengubah perjumpaan itu menjadi suatu rahmat yang menyelamatkan. Kesadaran seperti ini menjadi semakin jelas apabila Gereja, yaitu suatu komunitas umat

¹⁵ Konsili Vatikan II, hal. 521–222.

¹⁶ Paul Budi Kleden, ‘Berpijak di Bumi Berpihak kepada Manusia: Mandat dari *Gaudium et Spes*’, *Jurnal Ledalero*, 12.1 (2017), hal. 80.

¹⁷ Paul Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2003), hal. vii.

beriman dipahami sebagai sebuah komunitas kasih. Komunitas demikian tidak bisa dimaknai secara utuh apabila setiap manusia tinggal diam dalam cangkang ketertutupan dan kepentingan dirinya. Komunitas kasih itu akan bisa berdiri dengan kokoh di atas suatu kehendak yang kuat untuk bisa melampaui ketertutupan dengan bersolider dan berbela rasa. Dengan demikian, setiap orang yang mengambil bagian dalam komunitas kasih atau setiap anggota Gereja mesti bisa bersolider dengan sesama.

Ketiga, Gereja Keuskupan Ruteng sebagaimana tertuang dalam *Dokumen Sinode III Keuskupan Ruteng* mengemban visi pastoral: “persekutuan umat Allah Keuskupan Ruteng yang beriman solid, mandiri, dan solider”.¹⁸ Ciri solidaritas menjadi bagian integral dari arah pastoral Gereja lokal tersebut karena pada galibnya Gereja dibangun di atas persaudaraan yang mencakup baik hierarki maupun umat, klerus atau pun awam yang bersatu dalam kasih dan kerahiman Allah Tritunggal Mahakudus. Lebih lanjut, konsep beriman yang solider juga merujuk pada keberpihakan dan bela rasa terhadap orang miskin-menderita. Karena itu, pastoral Gereja Keuskupan Ruteng seturut Sinode III dipahami sebagai pastoral kontekstual dan integral yang bertitik tolak dari suka-duka, harapan, dan kecemasan umat/masyarakat dalam dimensi-dimensi kehidupan yang holistik dan utuh.¹⁹

Jika solidaritas telah menjadi bagian integral dari kehadiran Gereja, maka solidaritas seperti apa yang perlu dikembangkan Gereja di tengah situasi struktural seperti yang terjadi di Keuskupan Ruteng? Solidaritas terhadap kaum miskin atau masyarakat terpinggirkan tidak dapat dipahami sebagai suatu ungkapan tanpa makna dan nilai. Solidaritas itu mesti mengambil rupa dengan merumuskan bentuk-bentuknya yang aktual dan historis. Jon Sobrino, seorang teolog dari Amerika Latin, menyadari betul arti penting historisitas dan aktualitas solidaritas Gereja. Berdasarkan refleksi teologisnya terhadap situasi kemiskinan di Amerika Latin, konspirasi penguasa dalam melanggengkan kemiskinan, dan sikap militan Gereja dalam membela kaum miskin serta membongkar kebobrokan penguasa, Sobrino kemudian merumuskan suatu konsep solidaritas yang khas sekaligus universal.

¹⁸ Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode III (2013-2015) Keuskupan Ruteng: Pastoral Kontekstual Integral* (Yogyakarta: Penerbit asdaMEDIA, 2016), hal. 4.

¹⁹ Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, hal. 7.

Bagi Sobrino solidaritas Gereja adalah sesuatu yang bersifat historis dan efektif.²⁰ Sebagai sesuatu yang bersifat historis, solidaritas bersumber dari sesuatu yang konkret dalam sejarah. Solidaritas tidak dipaksakan oleh orang lain atau berdasarkan kehendak orang lain. Sebaliknya, solidaritas lahir dari kehendak dan perasaan sebagai manusia yang menyaksikan fakta-fakta objektif seperti penindasan, kemalangan, dan ketidakadilan. Sebagai sesuatu yang bersifat efektif, solidaritas Gereja mesti bisa membebaskan Gereja dari isolasinya dan melibatkan diri dengan kaum miskin.

Berdasarkan beberapa fakta objektif dan konsep teoretis di atas, penulis merasa tertarik untuk mengelaborasi secara lebih mendalam perihal teologi solidaritas menurut Jon Sobrino dan fenomena kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Teologi Solidaritas Jon Sobrino dan Relevansinya dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan Struktural di Keuskupan Ruteng”**. Unsur kebaruan dalam penelitian ini ialah kajian kepustakaan terhadap teologi solidaritas Jon Sobrino yang kemudian dikonfrontasikan dengan kenyataan kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng untuk menemukan solusi alternatif atas persoalan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini ialah apa makna teologi solidaritas Jon Sobrino dan bagaimana relevansi teologi solidaritas Jon Sobrino dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng?

Pertanyaan umum di atas akan dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa makna teologi solidaritas menurut Jon Sobrino?
2. Bagaimana situasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng?
3. Bagaimana tanggapan Gereja terhadap situasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng?
4. Bagaimana relevansi teologi solidaritas Jon Sobrino dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng?

²⁰ Jon Sobrino dan Juan Hernández Pico, *Teologi Solidaritas* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 17.

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna teologi solidaritas Jon Sobrino dan relevansinya dalam perjuangan Gereja lokal untuk mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng. Selain itu, penelitian ini secara khusus juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teologi di IFTK Ledalero.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan karya ini memberikan sejumlah manfaat bagi beberapa pihak yakni penulis, masyarakat, pemerintah, Gereja Keuskupan Ruteng, dan IFTK Ledalero. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Penulis

Penulisan karya ilmiah ini memberikan beberapa manfaat bagi penulis. *Pertama*, penulisan karya ilmiah ini membantu penulis untuk semakin mendalami teologi solidaritas Jon Sobrino dan mengkonfrontasikannya dengan kajian sosial-politik untuk merefleksikan realitas pastoral secara kritis dan kontekstual. *Kedua*, karya ilmiah ini membantu penulis untuk memahami dan mengkritisi model-model pembangunan yang mempermiskin mayoritas masyarakat kecil dan memperkaya minoritas elite politik-ekonomi. *Ketiga*, penulisan karya ilmiah ini juga membantu penulis untuk semakin memahami tanggapan pastoral Gereja Keuskupan Ruteng berhadapan dengan fenomena pemiskinan sistemik yang terjadi di tengah umat. *Kelima*, selain pada tataran teoretis-spekulatif, penulisan karya ilmiah ini mempunyai manfaat praksis bagi penulis yakni mengembangkan suatu mode berteologi yang kontekstual melalui karya pastoral yang tepat sasaran di waktu-waktu mendatang.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Penulisan karya ilmiah ini juga memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Manggarai Raya. *Pertama*, karya ilmiah ini membantu masyarakat untuk semakin sadar akan bentuk-bentuk pemiskinan sistemik yang telah dilakukan oleh aktor-aktor baik lokal, nasional, maupun global melalui ideologi kapitalisme neoliberal. Karena itu, manfaat *kedua* dari karya ilmiah ini ialah mendorong masyarakat untuk tidak menerima begitu saja

(*taken for granted*) pengalaman-pengalaman penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan mereka. Masyarakat dengan demikian dibantu untuk menjadi semakin kritis dengan melihat sebab-sebab struktural dari situasi negatif yang tengah mereka alami. *Ketiga*, penulisan karya ilmiah ini juga membantu masyarakat untuk setia menggalang solidaritas autentik terhadap sesama mereka yang menderita dan terpinggirkan agar bisa dibebaskan dari situasi-situasi yang menjerat mereka.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Penulisan karya ilmiah ini memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah khususnya pemerintah tiga kabupaten di Keuskupan Ruteng, yakni pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah Kabupaten Manggarai, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. *Pertama*, penulisan karya ilmiah ini menjadi salah satu masukan berarti bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan agar mempertimbangkan kepentingan-kepentingan kaum miskin dan orang-orang terpinggirkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. *Kedua*, penulisan karya ilmiah ini juga menyadarkan pemerintah agar tidak menjadi hamba aktor-aktor nasional atau global dengan meloloskan proyek-proyek yang menguntungkan mereka, alih-alih mengakomodasi kepentingan orang-orang miskin. *Keempat*, penulisan karya ilmiah ini juga mendorong pemerintah agar setia membangun kerja sama dan dialog dengan pihak Gereja, para pemimpin agama, dan masyarakat umumnya dalam mengupayakan solidaritas dan keberpihakan dengan orang-orang kecil. *Kelima*, jika pemerintah sudah sedemikian mapan dalam membangun simbiosis mutualisme dengan elite ekonomi lokal, nasional, atau global, maka karya ilmiah ini juga menjadi alarm bagi pemerintah agar bertobat dari kejahatan-kejahatan ekonomi politik demikian.

1.4.4 Bagi Gereja Keuskupan Ruteng

Karya ilmiah ini juga mempunyai beberapa manfaat bagi Gereja Keuskupan Ruteng. *Pertama*, karya ilmiah ini memberikan masukan berarti bagi arah pastoral Gereja Keuskupan Ruteng yang solid, mandiri, dan solider. Dengan menyertakan elaborasi perihal teologi solidaritas Jon Sobrino dan kajian ekonomi politik dalam konteks Manggarai Raya, karya ilmiah ini memberikan masukan berarti bagi

pemaknaan solidaritas dalam konteks Gereja Keuskupan Ruteng. *Kedua*, karya ilmiah ini juga menjadi refleksi kritis bagi bentuk-bentuk solidaritas yang sudah dibangun oleh Gereja Keuskupan Ruteng melalui program-program pastoralnya. *Ketiga*, karya ilmiah ini juga bermanfaat sebagai dukungan bagi opsi keberpihakan Gereja Keuskupan Ruteng terhadap orang-orang miskin dan kaum marginal. *Keempat*, karya ilmiah ini juga bermanfaat bagi Gereja Keuskupan Ruteng agar setia membangun dialog baik dengan umat maupun dengan pemerintah demi perwujudan nilai-nilai Kerajaan Allah sini dan kini.

1.4.5 Bagi IFTK Ledalero

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat bagi IFTK Ledalero. *Pertama*, IFTK Ledalero merupakan lembaga pendidikan yang mengemban visi sebagai “pusat pengembangan filsafat-teologi dan teknologi kreatif berbasis sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat nasional dan internasional, serta dijiwai oleh nilai-nilai kristiani dan semangat misi dialog profetis”. Kajian pemikiran Jon Sobrino perihal teologi solidaritas merupakan bagian dari upaya mengembangkan konsep teologi secara kontekstual dengan realitas nyata umat di Keuskupan Ruteng. *Kedua*, penulisan karya ilmiah ini juga menjadi salah satu pemenuhan tridharma perguruan tinggi, khususnya penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Dengan meneliti fenomena kemiskinan struktural di wilayah Keuskupan Ruteng, karya ilmiah ini menjadi bukti nyata dari upaya IFTK Ledalero untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi tersebut. *Ketiga*, penulisan karya ilmiah ini juga mendorong segenap *civitas academica* IFTK Ledalero agar tidak merasa nyaman dan mapan dengan menara gading pengetahuan filsafat, teologi, kewirausahaan, manajemen, atau pedagogik mereka, tetapi juga terjun ke dalam realitas faktual di tengah masyarakat untuk mengaplikasikan pengetahuan demi pembebasan dan transformasi di tengah masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sumber Data

Data untuk penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain: dokumen-dokumen Gereja Keuskupan Ruteng, majalah, surat kabar, dokumen

kantor pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik, dan referensi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

1.5.2 Prosedur dan Instrumen Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi dokumen/teks (*document study*), penulis melakukan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari dokumen/arsip tertulis. Untuk maksud itu, penelitian ini diawali dengan penyusunan dan diskusi proposal antara peneliti dan dosen-dosen pembimbing di IFTK Ledalero guna mendapatkan penyempurnaan dan kelayakan. Sesudah proposal penelitian ini diterima, selanjutnya peneliti melakukan studi mendalam atas berbagai dokumen dan referensi ilmiah yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode studi dokumen, analisis isi, dan analisis data sekunder.

- a) Studi dokumen berkaitan dengan kebijakan Gereja partikular dalam menanggapi persoalan kemiskinan di Keuskupan Ruteng dan politik pembangunan pemerintah sebagai solusi atas persoalan kemiskinan.
- b) Analisis isi berkaitan dengan isi pemberitaan perihal kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat yang dimuat dalam media cetak, media elektronik, atau media digital.
- c) Akhirnya, analisis data sekunder bermaksud mendalami dan menganalisis data yang telah dikumpulkan peneliti.

1.6 Asumsi dan Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis membangun sebuah asumsi bahwa teologi solidaritas Jon Sobrino memiliki relevansi dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng. Asumsi utama ini dapat dijabarkan dalam beberapa hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis pada bagian sebelumnya. *Pertama*, kemiskinan umat di Keuskupan Ruteng disebabkan oleh bentuk-bentuk ketidakadilan struktural dan salah kaprah kebijakan-kebijakan publik. *Kedua*, alih-alih bersikap indiferen, Gereja Keuskupan Ruteng memberikan tanggapan terhadap situasi kemiskinan struktural di kalangan

umat. *Ketiga*, makna teologi solidaritas Jon Sobrino menjadi sangat relevan dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural umat Keuskupan Ruteng.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini memiliki batasan berupa ruang lingkup tertentu sebagai fokus dan pokok persoalan yang akan diteliti. Bertolak dari masalah pokok yang sudah diangkat di atas, batasan penelitian ini adalah makna teologi solidaritas Jon Sobrino dan relevansinya dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng. Karena itu, penelitian ini akan berfokus pada makna teologi solidaritas Jon Sobrino, kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng, peran Gereja Keuskupan Ruteng dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng, dan relevansi teologi solidaritas Jon Sobrino dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng.

1.8 Definisi Term Teknis-Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa term teknis-operasional yang perlu diberikan batasan atau pengertian. Term teknis-operasional tersebut ialah:

1. Teologi Solidaritas Jon Sobrino

Teologi solidaritas Jon Sobrino merupakan refleksi teoretis Sobrino atas kebangkitan solidaritas antar-Gereja dan terutama kaum miskin di El Salvador. Refleksi-refleksi tersebut bukan berdasarkan pada suatu *apriori* perumusan konseptual semata, melainkan berdasarkan karya-karya nyata sebagai perwujudan solidaritas Gereja.²¹ Ada beberapa konsekuensi dari gagasan tentang solidaritas Sobrino ini. *Pertama*, penulis hanya mengelaborasi secara memadai refleksi teologis Sobrino perihal solidaritas. Kendati pada bagian tertentu penulis juga menyinggung beberapa konsep teologis Sobrino, hal itu dimaksudkan dalam rangka memahami secara lebih baik makna teologi solidaritas Sobrino. *Kedua*, solidaritas dalam pembahasan karya ilmiah ini ialah solidaritas dalam teologi Sobrino. Ada banyak kajian perihal solidaritas baik dalam teologi Gereja maupun dalam kajian-kajian humaniora. Kendati pada bagian tertentu penulis juga menyinggung konsep-konsep solidaritas dari sumber lain tersebut, hal itu dimaksudkan sebagai catatan

²¹ Sobrino dan Pico, hal. 12.

pembandingan untuk menemukan pemahaman yang lebih jelas dan distingtif atas makna solidaritas dalam teologi Sobrino.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor dari luar diri orang miskin, seperti penindasan dan pemerasan.²² Menurut Soedjatmoko, ada dua ciri khas kemiskinan struktural, yakni mobilitas sosial yang lamban akibat jeratan struktur sosial; dan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan mayoritas masyarakat miskin.²³ Jadi, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan masif yang dialami mayoritas masyarakat akibat struktur sosial yang tidak adil, yang menguntungkan elite tertentu dan menghambat mobilitas sosial, sehingga diperlukan perubahan struktur mendasar untuk memperbaiki nasib mayoritas masyarakat yang miskin.

3. Gereja Keuskupan Ruteng

Gereja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Gereja sebagai umat Allah yang melibatkan baik klerus maupun awam, hierarki atau pun umat dalam upaya mewujudkan karya keselamatan Allah dan menjadi tanda keselamatan bagi segala bangsa dengan setia mengintegrasikan panggilan keselamatan tersebut dalam karya nyata berupa keadilan bagi segenap umat manusia terutama kaum miskin dan tertindas. Dengan demikian, Gereja Keuskupan Ruteng merujuk pada mereka semua yang berjuang dan bergiat di bawah payung Gereja Keuskupan Ruteng untuk mewujudkan misi keselamatan tersebut. Secara administratif pemerintahan, Gereja Keuskupan Ruteng mencakup tiga kabupaten yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Dalam bagian-bagian tertentu karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan term Manggarai Raya untuk menyebutkan ketiga kabupaten di wilayah Keuskupan Ruteng tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibagi ke dalam enam bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah,

²² Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, hal. 53.

²³ Soedjatmoko, "Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan," dalam Melly Alfian dan G. Tan Selo Soemarjo (eds.), *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai* (Jakarta: YIIS, 1980), hal. 47.

tujuan, manfaat, metode, hipotesis, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua, penulis menguraikan riwayat hidup, karya-karya, dan konteks El Salvador sebagai *locus theologicus* dari refleksi teologi solidaritas Jon Sobrino. Bab ini akan diakhiri dengan rangkuman yang memetakan secara ringkas beberapa temuan dalam kajian-kajian penulis di bab yang kedua ini.

Dalam bab tiga, penulis membahas makna teologi solidaritas Jon Sobrino sebagai salah satu pokok penting dalam tulisan ini. Pembahasan dalam bab ini mencakup teologi pembebasan sebagai teologi yang mempengaruhi metode berteologi Jon Sobrino, refleksi teologi solidaritas Jon Sobrino, dan pandangan Ajaran Sosial Gereja perihal solidaritas Kristiani sebagai catatan pembanding. Sebagaimana bab sebelumnya, bab ini juga ditutup dengan sebuah kesimpulan.

Dalam bab empat, penulis menguraikan hakikat kemiskinan struktural dan profil Gereja Keuskupan Ruteng. Dalam menguraikan hakikat kemiskinan struktural, penulis lebih lanjut akan menjabarkan pemetaan konseptual perihal kemiskinan, makna kemiskinan struktural dalam paradigma ekonomi politik, serta hegemoni kapitalisme neoliberal dan kontroversi seputar pembangunan. Dalam menggambarkan profil Gereja Keuskupan Ruteng, penulis akan menjelaskan sejarah Gereja lokal Keuskupan Ruteng, keadaan geografis, kondisi sosiokultural, beberapa sektor unggulan, dan arah dasar pastoral Gereja lokal Keuskupan Ruteng. Sebagaimana pada bab sebelumnya, bab yang keempat ini juga akan ditutup dengan rangkuman yang memuat pemetaan singkat atas temuan-temuan penulis di bab ini.

Dalam bab lima, penulis akan mempresentasikan kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng yang mencakup wilayah Manggarai Raya dan relevansi teologi solidaritas Jon Sobrino dalam upaya mengatasinya. Kajian pada bab ini juga mencakup gambaran perihal tanggapan Gereja Keuskupan Ruteng terhadap kemiskinan struktural di Manggarai dan catatan kritis terhadapnya. Sebagaimana bab-bab sebelumnya, bab lima juga ditutup dengan sebuah kesimpulan.

Bab enam adalah bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan beberapa catatan rekomendasi penulis untuk mengatasi kemiskinan struktural di Keuskupan Ruteng seturut teologi solidaritas Jon Sobrino.